



P E N E T A P A N

Nomor 0346/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Iskandar Bin Harmis, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Jl. Imam bonjol Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Sri Ayu Binti Sudirman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTP, tempat tinggal Jl. Imam bonjol Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0346/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 1 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada Hari, Ahad 12 April 2012 di Kelurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Tahosa** , yang bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung pemohon 2 yang bernama **Sudirman** sedang yang menjadi saksi nikah masing – masing bernama

Hal. 1 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Isman dan Djon Ruhamza dengan mas kawin berupa Uang Rupiah 264 Ribu yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia anak yang bernama Dzaky Yuanda saputra, Lahir Tanggal 15 – 07 – 2013;
5. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa Pemohon 1 dan pemohon 2 bukan hubungan semenda atau sesusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama (KUA) Mandonga, dengan alasan petugas yang diminta bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya tersebut;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan nya tersebut;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah penikahan Pemohon 1 (Iskandar Bin Harmis) dan Pemohon 2 (Sri Ayu Binti Sudirman) yang dilaksanakan pada tanggal, 12 April 2012 di Kelurahan Wawombalata Kec. Mandonga;
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Hal. 2 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir diperidangan, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing :

1. **Ismail bin Abd Rahim**, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon I ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2012 di Kelurahan Wawombata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **Tahosa** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Sudirman**, dan saksi-saksi adalah Muh. Isman dan Djon Ruhamzah, dengan maskawin berupa uang Rp 264.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon 2 berstatus perawan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 3 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa selama dalam pernikahan mereka tidak pernah bercerai;
- 2. **Moh. Isman bin Sudirman** umur 28 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2012 di Kelurahan Wawombata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama **Tahosa** dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Sudirman**, dan saksi-saksi adalah Muh. Isman dan Djon Ruhamzah, dengan maskawin berupa uang Rp 264.000,- dibayar tunai;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan saudara sesusuan dan bukan hubungan semenda);
 - Bahwa waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon 2 berstatus perawan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak ada orang yang keberatan/mempersoalkan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di wilayah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan mereka memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian para Pemohon terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu **Muhidin dan H. Rahman**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Hal. 5 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 April 2012, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan Mas Kawin berupa uang Rp 264.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);
3. Bahwa selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam (bukan hubungan nasab, semenda dan sesusuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal. 6 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 7 ayat 3 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Iskandar bin Harmis) dengan pemohon II (Sri Ayu binti Sudirman) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di Kerlurahan Wawombalata, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Hal. 7 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000, (seratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1439 Hijriyah. oleh kami H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marwan,S.Ag.,S.H., MH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Ttd

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Marwan,S.Ag.,S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Penet. No.0346/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)